

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

2023

SELAMAT DATANG  
ANDA MEMASUKI KAWASAN  
ZONA INTEGRITAS  
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)  
PENGADILAN NEGERI SANGATTA  
KELAS II

BERANI  
MUKI  
HEBAT!

## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03  
BADAN PERADILAN UMUM

[www.id.pn-sangatta.go.id](http://www.id.pn-sangatta.go.id)  
[pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com)  
(0549) 21324

# **PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**

## **LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA – KUTAI TIMUR

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 21 Juli 2023

Sekretaris,



**Arini Widiastuti, S.IP.**  
NIP 197409182006042001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I.    Laporan Realisasi Anggaran	3
II.   Neraca	4
III.  Laporan Operasional	5
IV.  Laporan Perubahan Ekuitas	7
V.    Catatan atas Laporan Keuangan	8
A.  Penjelasan Umum	8
B.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C.  Penjelasan atas Pos-pos Neraca	18
D.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	20
E.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	21
F.  Pengungkapan Penting Lainnya	25
G.  Lampiran Lampiran	28



## PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projo Djodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

Id.pn-sangatta.go.id e-mail : pn\_sangatta@ymail.com

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 21 Juli 2023

Sekretaris,

**Arini Widiastuti, S.IP.**  
NIP. 197409182006042001

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17.184.500 atau mencapai 71 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 24.221.000

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 47.907.500 atau mencapai 39 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 122.010.000

**2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 434.929.377 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Terdapat Nilai Kewajiban sebesar Rp. 433.052.377 berupa biaya proses atau dana pihak ketiga lainnya dan per 30 Juni 2023 dan Ekuitas sebesar Rp 1.877.000

**3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 17.184.500 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 51.179.653 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp33.995.153) Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 33.995.153).

**4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp 318.000 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp33.995.153) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.35,554.153 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp1.877.000.

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 Juni 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	24,221,000.	17,184,500.	(7,036,500.)	71	20,015,000.	10,090,500.	9,924,500.	50
	PENERIMAAN HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>24,221,000.</b>	<b>17,184,500.</b>	<b>(7,036,500.)</b>	<b>71</b>	<b>20,015,000.</b>	<b>10,090,500.</b>	<b>9,924,500.</b>	<b>50</b>
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA BARANG	122,010,000.	47,907,500.	74,102,500.	39	121,392,000.	43,723,550.	77,668,450.	36
	BELANJA MODAL	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA SUBSIDI	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	<b>BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>0.</b>	<b>0.</b>	<b>0.</b>	<b>0</b>	<b>0.</b>	<b>0.</b>	<b>0.</b>	<b>0</b>
	Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

	Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Data Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Desa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>122,010,000.</b>	<b>47,907,500.</b>	<b>74,102,500.</b>	<b>39</b>	<b>121,392,000.</b>	<b>43,723,550.</b>	<b>77,668,450.</b>	<b>36</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

NERACA

PER 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN			JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
			2023	2022	Jumlah	%
1			2	3	4	5
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
	Kas di Bendahara Pengeluaran		10,000,000.	0	10,000,000	0.00
	Kas Lainnya dan Setara Kas		422,232,377.	0	422,232,377	0.00
	Persediaan		0.	318,000	(318,000)	(100.00)
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>432,232,377.</b>	<b>318,000</b>	<b>431,914,377</b>	<b>135,822.13</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>432,232,377.</b>	<b>318,000</b>	<b>431,914,377</b>	<b>135,822.13</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
	Utang kepada Pihak Ketiga		422,232,377.	0	422,232,377	0.00
	Utang Yang Belum Ditagihkan		820,000.	0	820,000	0.00
	Uang Muka dari KPPN		10,000,000.	0	10,000,000	0.00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>433,052,377.</b>	<b>0</b>	<b>433,052,377</b>	<b>0.00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>433,052,377.</b>	<b>0</b>	<b>433,052,377</b>	<b>0.00</b>
<b>EKUITAS</b>						
<b>EKUITAS</b>						
	Ekuitas		(820,000.)	318,000	(1,138,000)	(357.86)
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>(820,000.)</b>	<b>318,000</b>	<b>(1,138,000)</b>	<b>(357.86)</b>

## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

JUMLAH EKUITAS	(820,000.)	318,000	(1,138,000)	(357.86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	432,232,377	318,000	431,914,377	135,822.13

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

#### LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,184,500.	10,090,500.	7,094,000.	70.304
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	17,184,500.	10,090,500.	7,094,000.	70.304
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan	17,184,500.	10,090,500.	7,094,000.	70.304

## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Beban Pegawai	0.	0.	0.	0.
Beban Persediaan	22,093,653.	15,970,424.	6,123,229.	38.341
Beban Barang dan Jasa	25,303,000.	31,678,550.	(6,375,550.)	(20.126)
Beban Pemeliharaan	0.	0.	0.	0.
Beban Perjalanan Dinas	6,480,000.	9,900,000.	(3,420,000.)	(34.545)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0.
Beban Bunga	0.	0.	0.	0.
Beban Subsidi	0.	0.	0.	0.
Beban Hibah	0.	0.	0.	0.
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.	0.	0.	0.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	0.
Beban Transfer	0.	0.	0.	0.
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0.
JUMLAH BEBAN	53,876,653.	57,548,974.	(3,672,321.)	(6.381)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(36,692,153.)	(47,458,474.)	10,766,321.	(22.686)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(36,692,153.)	(47,458,474.)	10,766,321.	(22.686)
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	(36,692,153.)	(47,458,474.)	10,766,321.	(22.686)

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	318,000.	118,000.	200,000.	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(36,692,153.)	(47,458,474.)	10,766,321.	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	0.	0.	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.	0.	0.	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	35,554,153.	39,848,474.	(4,294,321.)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,138,000.)	(7,610,000.)	6,472,000.	-
EKUITAS AKHIR	(820,000.)	(7,492,000.)	6,672,000.	-

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

## A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No 01 – Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
  2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
  3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
  4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
  5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Meningkatnya kualitas pengawasan

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

### *Basis Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan  
Akuntansi

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 Periode Semester I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

Pendapatan  
-LRA

##### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan  
-LO*

**(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*                    **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*                    **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*                    **Aset Tetap**



- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

*Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi Akuntansi Pemerintah*

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Berbasis Akruwal  
Pertama Kali

Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan  
Rp17.184.500

### B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp17.184.500 atau 71 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp24.221.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan uang meja leges.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2023*

Uraian	30 Juni 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	Rp24.221.000	17.184.500	71
<b>Jumlah</b>	<b>Rp24.221.000</b>	<b>17.184.500</b>	<b>71</b>

Realisasi pendapatan per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.094.000 atau 21 persen dibandingkan 30 Juni 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) Rp	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	17.184.500	10.090.500	7.094.000	21
<b>Jumlah</b>	<b>17.184.500</b>	<b>10.090.500</b>	<b>7.094.000</b>	<b>21</b>

**B2. Belanja**

Realisasi Belanja  
Negara Rp.  
47.907.500

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp47.907.500 atau persen dari anggaran belanja sebesar Rp121.010.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	122.010.000	47.907.500	71
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>122.010.000</b>	<b>47.907.500</b>	<b>71</b>
Pengembalian Belanja	0	0	
<b>Jumlah</b>	<b>122.010.000</b>	<b>47.907.500</b>	<b>71</b>

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023 dan Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 47.907.500 dan Rp43.723.550.

Belanja Barang  
Rp47.907.500

URAIAN	REALISASI 30 Des 2023	REALISASI 30 Des 2022	NAIK (TURUN) %
--------	--------------------------	--------------------------	----------------------

Belanja Barang	47.907.500	43.723.500	(2)
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>47.907.500</b>	<b>43.723.500</b>	<b>(2)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp10.000.000

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATA 03 654446629871000	0	0
Uang Tunai	9.180.000	0
Kuitansi UP	820.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

### C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas lainnya atau setara kas Rp. 422.232.377

### C.3. Saldo kas lainnya atau setara kas

Saldo kas lainnya atau setara kas per 30 Juni 2023 adalah sebesar 422.232.377. Saldo kas lainnya atau setara kas adalah uang panjar perkara dan uang titipan pihak ketiga yang dititipkan pada rekening

perkara Pengadilan Negeri Sangatta.

Persediaan Rp0.

#### C.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp318.000

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Barang Konsumsi	0	318.000
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp10.000.000

#### C.5. Uang Muka dari KPPN

Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas  
Rp(820.000.)

#### C.6. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(820.000) dan Rp318.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL



Pendapatan  
PNBP  
Rp17.184.500

**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.17.184.500 dan Rp10.090.500

Beban  
Persediaan  
Rp22.093.653

**D.2. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22,093,653 dan Rp15.970.424 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp25.303.000

**D.3. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.303.000 dan Rp31,678,550 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban  
Perjalanan Dinas  
Rp6.480.000

**D.4. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,480,000 dan Rp9.900.000 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya Rp0

**D.5. Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. **Surplus** dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal  
Rp318.000

**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp318.000 dan Rp.118.000

Defisit LO

**E.2. Defisit LO**

(Rp36,692,153)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp36,692,153) dan (Rp. 47.458.474). Defisit LO merupakan selisih /kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

### E.3.

Penyesuaian  
Nilai Aset Rp0

#### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 . Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi Nilai Persediaan**

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0

#### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

#### E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain  
Rp0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

#### Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0

Koreksi Hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp35.554.153

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.554.153 dan Rp39.848.474.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

##### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar (Rp17.184.500) sedangkan DKEL sebesar Rp47.907,500.

##### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp4.831.153 dan tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

##### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak

terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Ekuitas Akhir  
Rp(820,000)

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(820,000) dan Rp(7,492,000)

### **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

#### **F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

#### **F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK**

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

#### **F.3. INFORMASI AKRUAL**

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 30 Juni 2023

#### **F.4. REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 654446629871000 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni sebesar Rp0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000742-30-7 a.n. RPL 046 PN SANGATA UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp436,053,877

#### **F.5. REVISI DIPA**

Hingga tanggal 30 Juni 2023, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II belum melakukan Revisi.

**F.6. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB**

Hingga tanggal 30 Juni 2023, Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada melakukan Rlat SPM, SP2D, SSBP Dan SSPB.

**F.7. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2023, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Arini Widiastuti, S.I.P.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Arini Widiastuti, S.I.P.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Muhamad Rodansa, S.I.P.
Bendahara Pengeluaran	:	Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B.
Bendahara Penerima	:	Aisyah, S.H., M.H.

**G . lampiran lampiran**

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 27/07/23 10:32 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	422,232,377	0	422,232,377	0.00
Persediaan	0	318,000	(318,000)	(100.00)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>432,232,377</b>	<b>318,000</b>	<b>431,914,377</b>	<b>135,822.13</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>432,232,377</b>	<b>318,000</b>	<b>431,914,377</b>	<b>135,822.13</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	422,232,377	0	422,232,377	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	820,000	0	820,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>433,052,377</b>	<b>0</b>	<b>433,052,377</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>433,052,377</b>	<b>0</b>	<b>433,052,377</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	(820,000)	318,000	(1,138,000)	(357.86)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(820,000)</b>	<b>318,000</b>	<b>(1,138,000)</b>	<b>(357.86)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(820,000)</b>	<b>318,000</b>	<b>(1,138,000)</b>	<b>(357.86)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>432,232,377</b>	<b>318,000</b>	<b>431,914,377</b>	<b>135,822.13</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kab. Kutai Timur, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

  
  
**ARINI WIDIASTUTI**  
 197409182006042001





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662987

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 27/07/23 10:32 AM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>122,010,000</b>	<b>47,907,500</b>	<b>74,102,500</b>	<b>39</b>	<b>121,392,000</b>	<b>43,723,550</b>	<b>77,668,450</b>	<b>30</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kab. Kutai Timur, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI  
197409182006042001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 30 JUNI 2023  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM  
 Tgl Cetak : 27/07/23 10:31 AM  
 Halaman : 1  
 lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,184,500	10,090,500	7,094,000	70.304
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	17,184,500	10,090,500	7,094,000	70.304
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	17,184,500	10,090,500	7,094,000	70.304
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	22,093,653	15,970,424	6,123,229	38.341
Beban Barang dan Jasa	25,303,000	31,678,550	(6,375,550)	(20.126)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	6,480,000	9,900,000	(3,420,000)	(34.545)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/07/23 10:31 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	53,876,653	57,548,974	(3,672,321)	(6.381)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(36,692,153)	(47,458,474)	10,766,321	(22.686)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(36,692,153)	(47,458,474)	10,766,321	(22.686)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(36,692,153)	(47,458,474)	10,766,321	(22.686)

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kab. Kutai Timur, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI  
197409182006042001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2023  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR  
SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 27/07/23 10:17 AM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	318,000	118,000	200,000	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(36,692,153)	(47,458,474)	10,766,321	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	35,554,153	39,848,474	(4,294,321)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,138,000)	(7,610,000)	6,472,000	-
EKUITAS AKHIR	(820,000)	(7,492,000)	6,672,000	-

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kab. Kutai Timur, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

  
ARINI WIDIASTUTI  
197409182006042001

